



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**RANWAL**

**RENJA**

Rancangan Awal Rencana Kerja

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan kasihNya sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Rancangan Awal Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Ranwal Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan perencanaan awal untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan. Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTA) Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Ranwal Renja ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran diharapkan demi perbaikan yang lebih baik lagi. Ranwal Renja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja dan yang membutuhkan Ranwal Renja ini.

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU



**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I.....1

PENDAHULUAN .....1

    A.    LATAR BELAKANG.....1

    B.    DASAR HUKUM .....1

    C.    MAKSUD DAN TUJUAN .....2

    D.    SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....3

BAB II.....4

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....4

BAB III .....9

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....9

    A.    TUJUAN DAN SASARAN .....9

    B.    CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TAHUN LALU.....10

BAB IV .....11

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....11

BAB V .....17

PENUTUP.....17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu .....5

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Satpol PP .....10

Tabel 3. 2 Capaian Tujuan Sasaran Tahun Lalu .....10

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....13



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada RENSTRA Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Satpol PP Tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja Satpol PP tahun berjalan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan system pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menyusun Rancangan Awal Renja yang selanjutnya Rancangan Awal Renja ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja.

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu; dan
9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 050/142/Bappeda/P3-B Tanggal 24 Januari 2020 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2021.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA yang merupakan acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama satu tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
2. Terwujudnya Penjabaran RENSTRA Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan RENJA PD Tahun 2021; dan
4. Melakukan evaluasi terhadap Renja Tahun Lalu dan Renja pada Tahun berjalan.

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

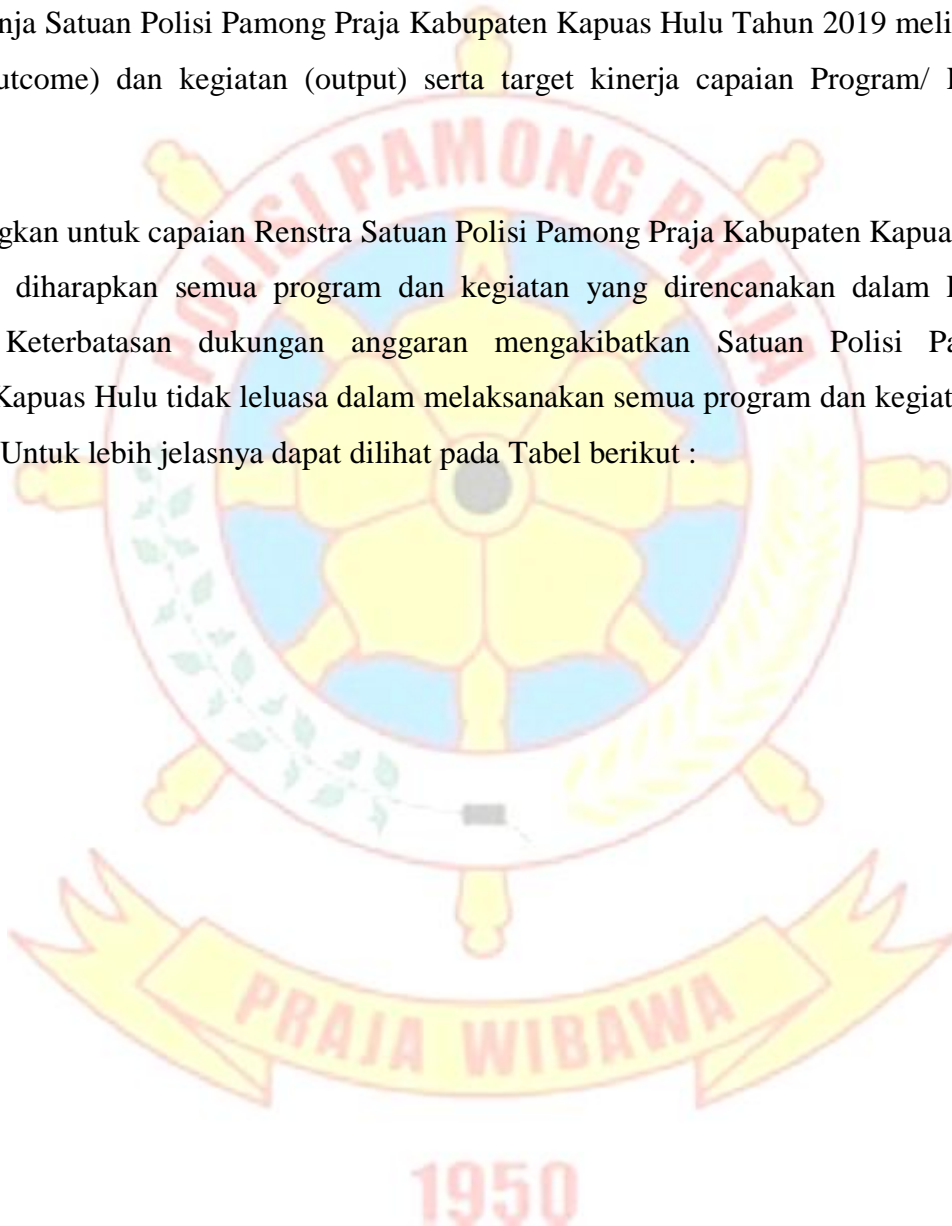


## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :





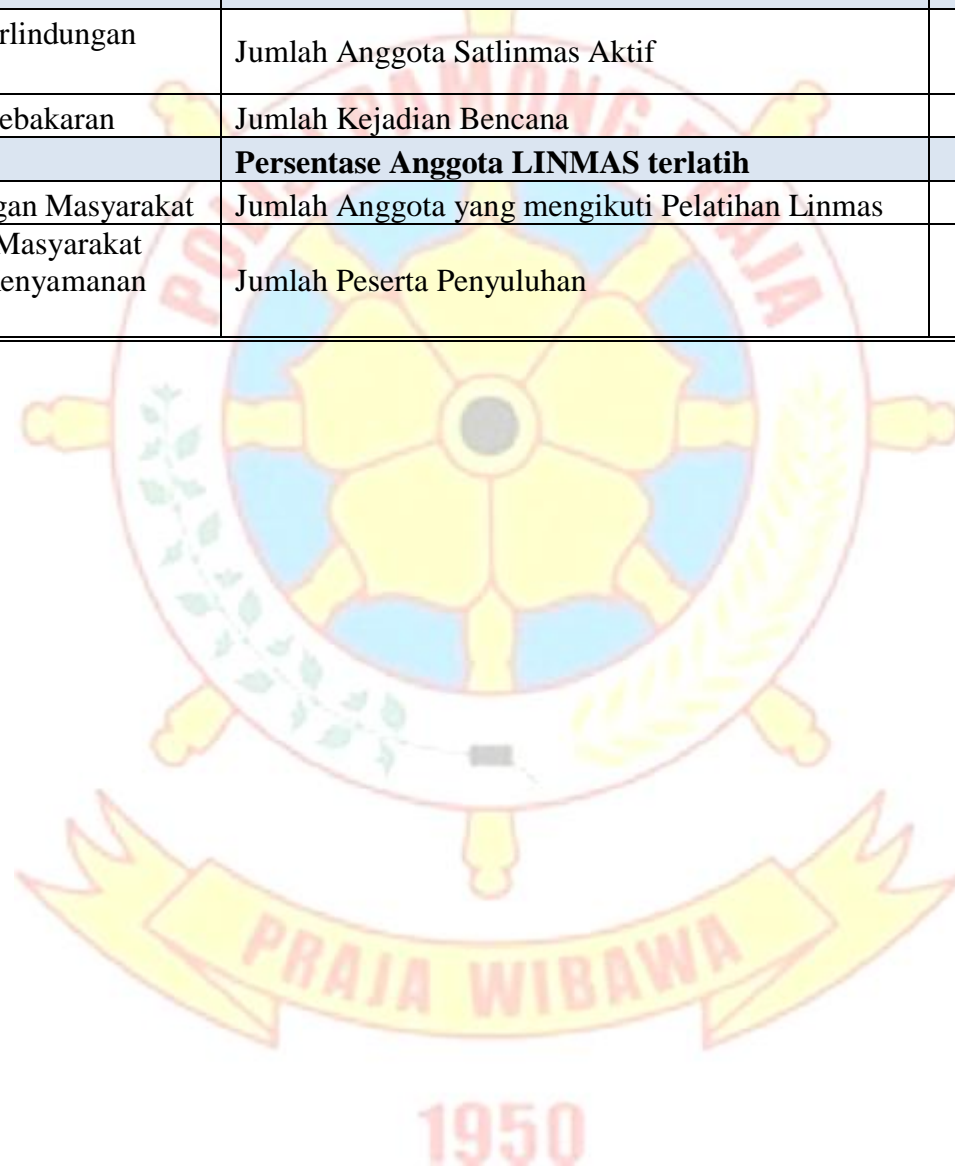
**Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu**

Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Renja 2019			Target Renja 2020	Target Renja 2021
P	K			Target	Realisasi	%		
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum &amp; Perlindungan Masyarakat</b>								
01		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>103%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	931	868	93%	1.050	1.050
01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	12	100%	12	12
			Pembayaran Tv Kabel dan Internet	5	5	100%	5	6
01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	9	150%	6	8
01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	194	182	94%	232	232
01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	31	115%	27	27
01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	71	71	100%	74	74
01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	5	5	100%	4	4
			Dokumen yang digandakan	14	14	100%	10	11
01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	17	17	100%	11	11
01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	13	13	100%	6	6
01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	0	0%	6	0
01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	5	5	100%	5	5
01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	88	100%	88	88
01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	7	9	129%	7	6
01	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	30	125	417%	42	42
01	031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	0	0%	2	2
01	060	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	0	0	0%	0	750

		Trantibum	Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	14	36	257%	28	17
			Jumlah Peserta Raker	0	0	0%	0	200
01	061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	2.712	2.710	100%	2.688	2.688
01	062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	1	100%	1	1
01	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	17	16	94%	17	17
<b>02</b>		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>
02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	0	0	0%	2	3
02	010	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	0	0	0%	1	9
02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah BBM	22.267	21.010	94%	18.050	18.050
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	46	67	146%	46	46
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	27	23	85%	25	25
02	025	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	0	0	0%	0	1
<b>03</b>		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>95</b>	<b>95%</b>
03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0	0	0%	0	200
03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	0	0	0%	88	100
<b>05</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten</b>	<b>67%</b>	<b>68%</b>	<b>101%</b>	<b>91%</b>	<b>95%</b>
05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0%	0	59
05	011	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	0	0	0%	0	100
05	028	Kesamaptaaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaaan	50	50	100%	50	50
05	030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	29	30	103%	32	32

05	031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	0	0	0%	50	50
05	032	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	0	0	0%	0	23
<b>06</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	0	0	0%	1	1
06	025	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		0	0	0%	1	0
06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	1	100%	1	1
<b>16</b>		<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda</b>	<b>50%</b>	<b>72%</b>	<b>144%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
16	006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	22	35	159%	27	25
16	008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	5	100%	5	5
16	009	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	61	100	164%	85	85
16	011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	4	4	100%	0	4
16	012	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	2	2	100%	0	3
16	013	Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	202	192	95%	30	12
16	014	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0	0	0%	0	20
16	016	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	0	0	0%	0	23
16	015	Penyusunan Raperda Tibum	Jumlah Raperda Tibum	1	1	100%	0	0

17		<b>Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Rasio Petugas LINMAS</b>	<b>0,96</b>	<b>0,33</b>	<b>34%</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>
17	002	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota Satlinmas Aktif	549	549	100%	549	0
17	006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kejadian Bencana	7	5	71%	0	3
20		<b>Peningkatan Kapasitas LINMAS</b>	<b>Persentase Anggota LINMAS terlatih</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	<b>25%</b>
20	001	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	0	0	0%	25	30
20	002	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	0	0	0%	0	80





## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; dan
2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

Adapun Sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP; dan
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Satpol PP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	10%	10%	20%	50%	65%	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TAHUN LALU

Tabel 3. 2 Capaian Tujuan Sasaran Tahun Lalu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Target 2021
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik		Predikat SAKIP	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	B	BB	BB	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	92%	100%	100%
		Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%	72%	65%	65%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	92%	100%	100%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam pencapaian Tujuan dan Saran tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTA 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, menetapkan 8 Program dan 43 Kegiatan:

#### **Program pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum
- Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya
- Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD
- Penyediaan Jasa Publikasi

#### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pengadaan Mebeulair
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

#### **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

#### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja
- Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pementahan Daerah (LPPD) di SKPD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantarntibmas
- Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA
- Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda
- Pengawasan Pedagang Kaki Lima
- Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah
- Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada
- Pembuatan Peta Rawan Trantibum

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran

Program Peningkatan Kapasitas LINMAS

- Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada Tahun 2021 dibutuhkan pendanaan/ anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021. Adapun rencana kerangka anggaran untuk Rancangan Awal RENJA tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021**

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat								
01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran		95%	3.923.601.000		95%	4.315.961.100
01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	1.050	4.625.000	APBD	1050	5.087.500
01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	12	40.320.000	APBD	12	44.352.000
			Pembayaran Tv Kabel dan Internet		6			6	
01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	Satuan Polisi Pamong Praja	8	7.800.000	APBD	8	8.580.000
01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	232	100.680.000	APBD	232	110.748.000
01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Satuan Polisi Pamong Praja	27	11.900.000	APBD	27	13.090.000
01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	Satuan Polisi Pamong Praja	74	87.201.500	APBD	74	95.921.650
01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	Satuan Polisi Pamong Praja	4	17.404.800	APBD	4	19.145.280
			Dokumen yang digandakan		11		APBD	11	
01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	11	23.305.000	APBD	11	25.635.500
01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	6	8.607.500	APBD	6	9.468.250



01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Langganan Koran	Satuan Polisi Pamong Praja	5	8.400.000	APBD	5	9.240.000
01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	Satuan Polisi Pamong Praja	88	222.640.000	APBD	88	244.904.000
01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	6	386.042.000	APBD	6	424.646.200
01	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	42	313.600.000	APBD	42	344.960.000
01	031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	2	4.489.200	APBD	2	4.938.120
01	060	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	Kabupaten Kapuas Hulu	750	229.386.000	APBD	750	252.324.600
			Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	Provinsi Kal-Bar	17			17	
			Jumlah Peserta Raker	Kabupaten Kapuas Hulu	200			200	
01	061	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	Satuan Polisi Pamong Praja	2.688	2.422.200.000	APBD	2688	2.664.420.000
01	062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	29.900.000	APBD	1	32.890.000
01	066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Spanduk yang Disediakan	Satuan Polisi Pamong Praja	17	5.100.000	APBD	17	5.610.000
02		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur dalam kondisi BAIK</b>		<b>90%</b>	<b>977.070.000</b>	<b>APBD</b>	<b>120</b>	<b>1.074.777.000</b>
02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	3	546.100.000	APBD	3	600.710.000
02	010	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan Mebeulair	Satuan Polisi Pamong Praja	9	13.600.000	APBD	9	14.960.000
02	024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah BBM	Satuan Polisi Pamong Praja	18.050	233.770.000	APBD	18050	257.147.000
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan		46			46	
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan		25			25	



02	025	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Satuan Polisi Pamong Praja	1	183.600.000	APBD	1	201.960.000
<b>03</b>		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta kelengkapannya</b>		<b>95%</b>	<b>377.580.000</b>		<b>95%</b>	<b>415.338.000</b>
03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Satuan Polisi Pamong Praja	200	352.580.000	APBD	200	387.838.000
03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	Satuan Polisi Pamong Praja	100	25.000.000	APBD	100	27.500.000
<b>05</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten</b>		<b>95%</b>	<b>1.100.591.000</b>	<b>APBD</b>	<b>95%</b>	<b>1.210.650.100</b>
05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	59	787.071.000	APBD	59	865.778.100
05	011	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	Kabupaten Kapuas Hulu	100	147.500.000	APBD	100	162.250.000
05	028	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	Satuan Polisi Pamong Praja	50	16.800.000	APBD	50	18.480.000
05	030	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	Satuan Polisi Pamong Praja	32	79.490.000	APBD	32	87.439.000
05	031	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	Satuan Polisi Pamong Praja	50	15.500.000	APBD	50	17.050.000
05	032	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	Pts Utara & Pts Selatan	23	54.230.000	APBD	23	59.653.000
<b>06</b>		<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>95%</b>	<b>14.532.000</b>	<b>APBD</b>	<b>95%</b>	<b>15.985.200</b>
06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	2.587.000	APBD	1	2.845.700
06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1	11.945.000	APBD	1	13.139.500

16		<b>Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda</b>		<b>65%</b>	<b>762.397.000</b>		<b>85%</b>	<b>838.636.700</b>
16	006	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Jumlah Kegiatan Pengamanan	Kabupaten Kapuas Hulu	25	160.593.000	APBD	25	176.652.300
16	008	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	Kabupaten Kapuas Hulu	5	89.289.000	APBD	5	98.217.900
16	009	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	85	30.546.000	APBD	85	33.600.600
16	011	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	Kabupaten Kapuas Hulu	4	52.231.000	APBD	4	57.454.100
16	012	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	Kabupaten Kapuas Hulu	3	71.248.000	APBD	3	78.372.800
16	013	Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	Kabupaten Kapuas Hulu	12	299.400.000	APBD	12	329.340.000
16	014	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kabupaten Kapuas Hulu	20	14.500.000	APBD	20	15.950.000
16	016	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	23	44.590.000	APBD	23	49.049.000
17		<b>Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Rasio Petugas LINMAS</b>		<b>0,98</b>	<b>57.300.000</b>	<b>APBD</b>	<b>0,98</b>	<b>63.030.000</b>
17	006	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Jumlah Kejadian Bencana	Kabupaten Kapuas Hulu	3	57.300.000	APBD	3	63.030.000
20		<b>Peningkatan Kapasitas LINMAS</b>	<b>Persentase Anggota LINMAS terlatih</b>		<b>25%</b>	<b>117.180.000</b>	<b>APBD</b>	<b>25%</b>	<b>128.898.000</b>
20	001	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	Kabupaten Kapuas Hulu	30	88.210.000	APBD	30	97.031.000
20	002	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Peserta Penyuluhan	Putussibau	80	28.970.000	APBD	80	31.867.000
<b>TOTAL</b>						<b>7.330.251.000</b>			<b>8.063.276.100</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketenteraman sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengarahkan RENJA 2021 pada program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan RENJA pada program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

  
**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001